

# EVALUASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI RIAU

## *EVALUATION OF PUBLIC INFORMATION TRANSPARENCY POLICIES IN RIAU PROVINCE*

Resa Vio Vani <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: Resavani31@gmail.com

**Abstrak:** Transparansi Pemerintahan Daerah di website resmi pemerintah daerah adalah bentuk atau upaya pemerintah dalam mencegah dan/atau meminimalisir korupsi, karena dengan adanya transparansi yang diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dan dengan adanya kebebasan akses oleh publik dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan sulit dilakukannya manipulasi data. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan dan trend evaluasi kebijakan transparansi informasi publik melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan systematic literature review. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mayoritas kajian mengenai evaluasi kebijakan informasi public berfokus pada e-government, belum banyak yang meneliti tentang evaluasi transparansi yang seharusnya menjadi aspek krusial.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Transparansi, Informasi Publik

*Abstract:* Local Government Transparency on the official website of the local government is a form or government effort to prevent and / or minimize corruption, because transparency is believed to increase public supervision of the government and with freedom of access by the public in obtaining information related to government administration so that it will be difficult to manipulate data. Corruption is one of the biggest problems in state financial management. The purpose of this study is to determine the policy evaluation and evaluation trends of public information transparency policies through qualitative research methods with a systematic literature review approach. The results state that the majority of studies on public information policy evaluation focus on e-government, not many have examined the evaluation of transparency which should be a crucial aspect.

**Keywords:** Policy Evaluation, Transparency, Public Information

### PENDAHULUAN

Transparansi saat ini menjadi agenda penting seiring semakin kuatnya desakan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Subhan 2017). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sebagai unsur utama, pada hakikatnya terdapat prinsip yang menengahkan keseimbangan antara masyarakat dengan negara juga negara dengan pribadi, yang berarti setiap kebijakan publik harus melibatkan berbagai pihak dan sektor baik di sektor pemerintah, sektor publik, maupun sektor swasta dengan adanya aturan yang jelas. publik terbaik. Setelah hari Anti korupsi pada

tahun 2016, di Riau baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih dikategorikan belum melakukan pembenahan yang baik terhadap tata kelola pemerintahn daerahnya. Terlihat ditemukannya beberapa daerah Kabupaten/Kota yang bermasalah dengan KPK. Diantaranya ditemukannya kasus tahun 2015 terjadi kasus korupsi yang menjerat Eks Gubernur Riau Annas Maamun terkait kasus korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit. Tahun 2022 mantan Gubernur Riau Annas Maamun kembali terjerat kasus kasus korupsi. Kali ini Aanaas Maamun Gubernur Riau periode 2014-2019 kembali ditahan terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD-P tahun anggaran 2014 dan/atau RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau. (Andryanto 2022).

Melalui konsep tata kelola pemerintah yang dinamis (*Dynamic Governance*) akan tercapai ketika kebijakan yang adaptif dijalankan. Kebijakan yang adaptif ini lebih merujuk kepada *policy diffusion* (Baybeck, Berry, & Siegel, 2011; Gilardi, 2016). Maka dari itu pelaksanaan *e-government* dan transparansi informasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah kembali dipertegas dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berpartisipasi mendukung aksi pencegahan, pemberantasan korupsi, dan wajib berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri. Dengan diterbitkannya beberapa peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan tuntutan dari masyarakat yang mana pemerintah harus memberikan respon yang positif. Dengan Pemerintah melakukan transparansi maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang faktual dan aktual sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Mahmudi 2019 : 3).

Pemerintahan demokratis menjaga legitimasinya dengan menjawab tuntutan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, sehingga terus-menerus mengadopsi dan melaksanakan kebijakan, program, dan peraturan administratif baru (Lourenco, 2023). Transparansi Pemerintahan Daerah di website resmi pemerintah daerah adalah bentuk atau upaya pemerintah dalam mencegah dan/atau meminimalisir korupsi, karena dengan adanya transparansi yang diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dan dengan adanya kebebasan akses oleh publik dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan sulit dilakukannya manipulasi data. Korupsi merupakan salah satu

permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk tingkat daerah, sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah korupsi dengan memaksimalkan transparansi informasi keuangan daerah. Dengan lahirnya UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengintruksikan bahwa setiap badan publik (Daerah/Pusat) agar mempublikasikan segala program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam website resmi pemerintah dan mempublikasikan data mutakhir.

Pemerintah di seluruh dunia terlibat dalam sejumlah inisiatif transparansi. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai dampak positif, termasuk partisipasi warga (Cohen et al., 2017; Cucciniello et al., 2017; Halachmi & Greiling, 2013; Manes Rossi, 2019; Manes Rossi et al., 2019; Meijer et al., 2012; Piotrowski & Borry, 2010; Porumbescu et al., 2017). Terdapat dua informasi yang dapat dibagikan oleh publik yaitu informasi publik dan Informasi yang dikecualikan oleh publik. Informasi publik yaitu informasi yang bisa di buka oleh publik di situs website, sementara informasi yang dikecualikan oleh publik yaitu informasi yang memang tidak boleh diakses oleh publik karena tidak untuk konsumsi publik yang dikarenakan apabila disebarluaskan oleh publik akan mengakibatkan ancaman keamanan bagi Pemerintah/Negara. Seperti misalnya Laporan Keuangan yang belum di audit. (Kurniawan 2020). Meskipun telah ada peraturan perundangan yang memerintahkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan transparansi anggaran daerahnya, akan tetapi realitanya ditemukan tidak semua wujud transparansi dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian

sebelumnya yang diteliti oleh Ritonga dan Syamsul (2016) mengenai keterbukaan informasi keuangan daerah terhadap seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Se-Indonesia, menunjukkan bahwa Provinsi Riau dan Provinsi Jambi termasuk dalam kategori tidak cukup (Sufficient) dan kategori sedikit (Scant or none).

Untuk informasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap perencanaan Provinsi Riau memperoleh skor 0 atau indeks sebesar 0, informasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap pelaksanaan memperoleh skor 2,5 atau indeks sebesar 27,78% , dan untuk informasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap pelaporan dan pertanggungjawaban memperoleh skor 1 atau indeks sebesar 10% . Sementara Provinsi Jambi untuk informasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap perencanaan memperoleh skor 1 atau indeks sebesar 10%, informasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap pelaksanaan memperoleh skor 1 atau indeks sebesar 11,11% , dan untuk informasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap pelaporan dan pertanggungjawaban memperoleh skor 1 atau indeks sebesar 10% . (Ritonga and Syamsul 2016). Selain itu, Penguatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik, pengorganisasian dan pembentukan komunitas warga desa penghasil migas, penguatan kapaistas CSO dan warga untuk mengakses informasi publik, penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan anggaran untuk mahasiswa dan media massa. Selama kurun waktu itu, Fitra Riau telah melakukan kerjasama dengan mitra-mitranya, baik itu lembaga donor, NGO Lokal dan Nasional, pemerintah daerah untuk mengembangkan model perbaikan pelayanan publik, reformasi kebijakan, dan pengelolaan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu beberapa strategi agar transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan antara lain, pertama, mengidentifikasi Peran Masyarakat. Aspek ini menjadi

penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Menurut Uphoff (2022) bahwa masyarakat merupakan akar rumput yang harus diperhatikan hak dan kewajibannya. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review, Penulis melakukan review penelitian dengan metode SLR, yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk pada kajian atau metodologi penelitian tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang relevan pada fokus subjek tertentu (Triandini et al. 2019, 63–76). Tahapan penelitian ini adalah menemukan persamaan dan perbedaan (*Compare*), menemukan persamaan dan perbedaan (*Contrast*), memberikan pendapat (*Criticize*), membandingkan (*Synthesize*) dan meringkas (*Summarize*). Mencari kesamaan, trik dalam melakukan review adalah mencari kesamaan antara beberapa literatur dan menarik kesimpulan. Mencari perbedaan; trik dalam melakukan review adalah menemukan perbedaan antara beberapa literatur dan menarik kesimpulan. Opini; teknik berkomentar dengan mengemukakan pendapat sendiri terhadap suatu sumber yang dibaca. perbandingan; teknik meninjau dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi ide baru. Singkatnya, trik untuk melakukan review adalah menulis ulang sumber dengan kata-kata Anda sendiri. Sehingga penulis dapat mengidentifikasi tahapan penelitian, teknik, metode atau algoritma yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Tren publikasi

penelitian pada 5 tahun terakhir adalah analisa Bibliometrics. Bibliometrics adalah salah satu cabang ilmu informasi yang biasa digunakan di bidang perpustakaan untuk mencari tahu tahun publikasi, sitasi, dan gambar serta grafik dalam teks artikel secara detail. Bibliometrics banyak digunakan untuk mempelajari interaksi antara sains dan teknologi; untuk menyelidiki perkembangan ilmiah baru di bidang tertentu, dan untuk menghasilkan peta ilmiah. Peta yang dimaksud adalah visualisasi peta dengan tema ilmiah yang dapat membantu peneliti mengembangkan rencana penelitiannya. Visualisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Publish or Pharis dan VOS viewer (Saadah dan Sopia, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan. Evaluasi setelah pelaksanaan disebut juga evaluasi sumatif. Pengembangan pendekatan evaluasi implementasi.

**Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn**

| Tipe kriteria | Pertanyaan   | Ilustrasi   |
|---------------|--|---|
| Efektivitas   | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?  | Unit pelayanan  |
| Efisiensi     | Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?                    | Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost- benefit         |
| Kecukupan     | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?                             | Biaya tetap, Efektivitas tetap.                         |
| Pemerataan    | Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?      | Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls. |
| Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? | Konsistensi dengan survei warga negara                  |
| Ketepatan     | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?                       | Program publik harus merata dan efisien.                |

Analisis data tersebut menunjukkan adanya kendala dalam kebijakan transparansi informasi publik di Provinsi Riau. Dari tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tidak menyediakan informasi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di website resmi mereka. Hanya Dumai, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir yang memberikan akses terhadap informasi tersebut. Keterbatasan akses terhadap dokumen APBD di website resmi Pemerintahan Daerah dapat menjadi hambatan dalam mencapai transparansi informasi publik di Provinsi Riau. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi penggunaan anggaran publik serta proses pembuatan keputusan di tingkat daerah. Selain itu, data populasi masyarakat Riau yang memiliki pekerjaan utama terkait administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib menunjukkan adanya potensi besar untuk melibatkan mereka dalam proses evaluasi kebijakan transparansi informasi publik di Provinsi Riau. Mereka memiliki keahlian dan pemahaman yang relevan dalam transparansi pemerintahan dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi publik. Berdasarkan analisis ini, evaluasi kebijakan transparansi informasi publik di Provinsi Riau perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi APBD di semua Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat melibatkan perbaikan dalam sistem pengelolaan dan publikasi informasi, serta penguatan kapasitas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas transparansi pemerintahan.

Selain itu, melibatkan masyarakat yang memiliki pekerjaan terkait administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib dalam evaluasi kebijakan dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan transparansi informasi publik yang ada, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan kebijakan

transparansi informasi publik di Provinsi Riau dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi publik yang penting bagi partisipasi mereka dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan.

**Tabel 2. Ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se Kabupaten /Kota Provinsi Riau di Website Resmi Pemerintah**

| Provinsi Riau |                   |     |           |
|---------------|-------------------|-----|-----------|
| No            | Kabupaten /Kota   | Ada | Tidak Ada |
| 1             | Pekanbaru         |     | √         |
| 2             | Dumai             | √   |           |
| 3             | Siak              |     | √         |
| 4             | Rokan Hulu        |     | √         |
| 5             | Rokan Hilir       |     | √         |
| 6             | Pelalawan         |     | √         |
| 7             | Kuantan Singingi  | √   |           |
| 8             | Kepulauan Meranti |     | √         |
| 9             | Kampar            |     | √         |
| 10            | Indragiri Hilir   |     | √         |
| 11            | Indragiri Hulu    | √   |           |
| 12            | Bengkalis         |     | √         |

Sumber : Provinsi Riau dalam Angka, 2023

landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan Pemerintah yang adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini menjadi faktor esensial dalam konteks upaya Pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, salah satunya dalam aspek pengelolaan informasi publik (Rahmatunnisa, M., 2019). Proses-proses kebijakan publik semakin menjadi lebih iteratif (Brunswick et al., 2019) dan partisipatif (Chun & Cho, 2012; Kim & Lee, 2017) sebagai bagian dari inisiatif pemerintah terbuka. Ini mencakup penggunaan platform media sosial (Ferro, Loukis, Charalabidis, & Osella, 2013), situs simulasi, alat visualisasi, dan permainan serius (Janssen & Helbig, 2018) untuk mendorong keterlibatan warga sipil (Ferro et al., 2013) dan crowdsourcing untuk

mengumpulkan pendapat publik (Chun & Cho, 2012; Ferro et al., 2013; Janssen & Helbig, 2018).

Berdasarkan tabel 1. dapat terlihat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau hanya Dumai, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir yang menyediakan informasi dokumen APBD T.A 2020. Selebihnya Kota Pekanbaru, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Palelawan, Kepulauan Meranti, Kampar, Indragiri Hulu dan Bengkalis, tidak menyediakan informasi dokumen APBD dalam *website* resmi masing-masing Pemerintahan Daerahnya. Selain itu jika dilihat melalui populasi masyarakat Riau dengan karakteristik memiliki pekerjaan utama sebagai administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib/*public administration and defence, compulsory social security* yang secara langsung bertanggungjawab dalam transparansi pemerintahan Provinsi Riau berjumlah 55.930 orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu, temuan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tertinggi terjadi pada individu yang merasa paling memahami informasi publik, namun sebenarnya memiliki tingkat pemahaman yang paling rendah (Langgela et al, 2023).

### Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis dengan Aplikasi Publish or Perish

Berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data dari observasi hingga dokumen yang diperoleh melalui aplikasi publish or pharis dengan sumber <https://scholar.google.co.id/>. Publish or Perish adalah perangkat lunak yang membantu para peneliti menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah mereka yang diterbitkan. Penulis menggunakan kata kunci *public private partnership*, kebijakan public, koordinasi dengan batasan penelitian tahun 2018-2023. Penulis hanya membatasi 500 penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini.

Hasil pencarian pada data base google scholar didapatkan 499 karya tulis. Selanjutnya penulis melakukan seleksi

karya ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Hasil proses penelitian yang ditampilkan pada tabel dikelompokkan berdasarkan jenis jurnal untuk memudahkan melihat jenis data atau jenis jurnal yang diperoleh melalui proses pencarian sebagai berikut:

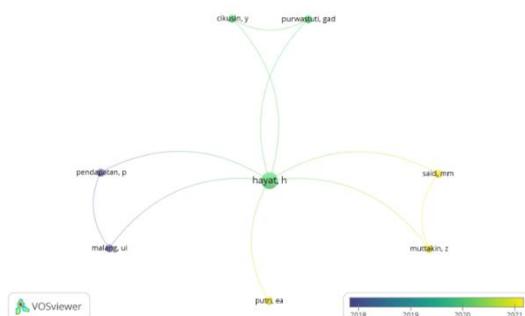
**Gambar 1. Hasil pencarian pada aplikasi Publish or Pharis**

| Citation metrics                |                  | Help |
|---------------------------------|------------------|------|
| Publication years:              | 2018-2023        |      |
| Citation years:                 | 5 (2018-2023)    |      |
| Papers:                         | 500              |      |
| Citations:                      | 8539             |      |
| Cites/year:                     | 1707.80          |      |
| Cites/paper:                    | 17.08            |      |
| Authors/paper:                  | 1.99             |      |
| h-index:                        | 29               |      |
| g-index:                        | 81               |      |
| hI,norm:                        | 25               |      |
| hI,annual:                      | 5.00             |      |
| hA-index:                       | 15               |      |
| Papers with ACC >= 1,2,5,10,20: | 361,229,98,31,10 |      |

Sumber: Hasil analisa penulis 2023

Tahap selanjutnya penulis melakukan seleksi jurnal penelitian yang sesuai dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Sebanyak 500 jurnal lolos proses pencarian. Sebanyak 25 artikel jurnal dinilai kualitasnya setelah dilakukan seleksi data berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan menggunakan kata kunci *Evaluasi kebijakan, transparansi informasi publik*. Berdasarkan hasil quality assessment (QA), terdapat 25 artikel jurnal yang relevan, yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan platform pengembangan dan metode yang digunakan. Tahap selanjutnya penulis melakukan analisa empat jurnal penelitian dengan kriteria jumlah sitasi, h-index dan g-index.

**Gambar 2. Analisa Bibliometrik dengan Vos viewer Co-Occurrence**



Co-Occurrence adalah menghitung kesamaan asimetris antar suku dengan melihat kemunculan bersama dua suku.

**Tabel 3. Hasil Seleksi Artikel**

| No | Sitasi | Penulis   | Judul  | Tahun |
|----|--------|---|--|-------|
| 1  | 61     | Indah, T., & Hariyanti, P.                        | Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya.           | 2018  |
| 2  | 56     | Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. | Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik                             | 2019  |
| 3  | 43     | Muliawaty, L., & Hendryawan, S                    | Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang) | 2020  |
| 4  | 27     | Nurdin, A. H. M.                                  | Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government.                      | 2018  |

Sumber: Hasil analisa penulis 2023

Selanjutnya penulis melakukan analisa lanjutan menggunakan aplikasi Vos viewer. Vos viewer adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data yang dipublikasikan. Perangkat lunak ini berguna bagi peneliti, pustakawan, dan administrator database publikasi untuk menganalisis data publikasi dan jaringan kolaboratif. Berikut adalah hasil analisa data menggunakan aplikasi Vos viewer.

Dari Gambar 2. dapat dilihat bahwa penulis yang terbanyak melakukan riset mengenai evaluasi kebijakan transparansi informasi public adalah hayat h dengan melakukan kolaborasi penelitian Bersama penulis lainnya pada tahun 2020.

**Gambar 3. Overlay Visualization**



Gambar 3. Diatas adalah overlay visualization yang diolah dengan aplikasi Vos Viewer. Terdapat empat warna yang menggambarkan tingkat kebaruan penelitian. Penulis menentukan penelitian dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Dapat diketahui bahwa tema penelitian public informasi public telah banyak diteliti periode 2020. Namun penelitian yang membahas tentang evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan transparansi informasi publik masih jarang dilakukan, mayoritas penelitian informasi public berkaitan dengan good governance, maka dengan ini dapat disimpulkan tingkat kebaruan yang tinggi. Sehingga dari analisa tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema evaluasi kebijakan transparansi Informasi Publik di Provinsi Riau. Analisis indikator-indikator tersebut dan penerapannya dalam konteks transparansi kebijakan informasi publik di Riau adalah sebagai berikut (Anderson dalam kewengian, 2015):

1. Sumber yang tidak mencukupi: Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi transparansi kebijakan informasi publik di Riau adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal manusia, anggaran, atau infrastruktur. Jika sumber daya yang diperlukan untuk memfasilitasi dan mendorong transparansi tidak mencukupi, hal ini dapat menghambat proses publikasi dan akses terhadap informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung transparansi kebijakan informasi publik di Riau.
2. Metode pelaksanaan kebijakan: Metode pelaksanaan kebijakan juga dapat mempengaruhi transparansi informasi publik. Jika metode yang digunakan kurang efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Riau, maka hal tersebut dapat menghambat akses terhadap informasi publik yang penting. Evaluasi metode pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transparansi informasi publik dapat tercapai dengan baik.
3. Masalah publik yang berfokus pada satu permasalahan: Jika kebijakan hanya berfokus pada satu permasalahan tertentu dan tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas, hal ini dapat mempengaruhi transparansi informasi publik. Dalam konteks Riau, penting untuk memastikan bahwa kebijakan transparansi informasi publik tidak hanya berfokus pada satu aspek atau sektor, tetapi juga mencakup berbagai isu penting yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Respon dan keterbiasaan masyarakat terhadap kebijakan publik: Tingkat partisipasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik juga dapat mempengaruhi transparansi informasi publik. Jika masyarakat tidak aktif terlibat dalam memantau dan mengawasi kebijakan publik, atau jika mereka tidak terbiasa dengan praktik transparansi informasi publik, maka tujuan transparansi mungkin sulit tercapai. Diperlukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran akan pentingnya transparansi informasi publik.
5. Tujuan kebijakan yang saling bertentangan: Jika tujuan kebijakan yang ada saling bertentangan, hal ini dapat menghambat transparansi informasi publik. Penting untuk memastikan adanya konsistensi dan keselarasan antara berbagai kebijakan yang berkaitan dengan transparansi informasi publik di Riau.
6. Biaya yang besar: Biaya yang besar dalam implementasi kebijakan transparansi informasi publik juga dapat menjadi hambatan. Diperlukan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta pemilihan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia.
7. Ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik: Beberapa masalah publik mungkin sulit untuk

diselesaikan sepenuhnya melalui tindakan kebijakan. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi transparansi informasi publik. Sebaliknya, penting untuk tetap memberikan akses terhadap informasi tentang langkah-langkah yang diambil dan progres dalam penyelesaian masalah publik tersebut.

8. Sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan: Sifat masalah publik yang harus diselesaikan melalui kebijakan juga dapat mempengaruhi transparansi informasi publik. Beberapa masalah publik mungkin lebih kompleks atau kontroversial, dan perlu adanya pendekatan komunikasi yang hati-hati dan transparan untuk memastikan informasi yang tepat dan jelas tersedia untuk masyarakat.

## KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut, evaluasi kebijakan transparansi informasi publik di Riau perlu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan peluang untuk meningkatkan transparansi informasi publik. Evaluasi ini dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan transparansi informasi publik di Riau, termasuk alokasi sumber daya yang memadai, metode pelaksanaan yang efektif, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan penanganan yang tepat terhadap kendala yang terkait dengan biaya, tujuan yang saling bertentangan, dan kompleksitas masalah publik..

## DAFTAR PUSTAKA

- Baybeck, B., Berry, W. D., & Siegel, D. A. (2011). A strategic theory of policy diffusion via intergovernmental competition. *The Journal of Politics*, 73(1), 232-247. doi:10.1017/S0022381610000988
- Brunswicker, S., Priego, L. P., & Almirall, E. (2019). Transparency in policy making: A complexity view. *Government Information Quarterly*, 36(3), 571-591.
- Chun, S., & Cho, J. S. (2012). E-participation and transparent policy decision making. *Information Polity*, 17(2), 129-145.
- Cohen, S., Mamakou, X. J., & Karatzimas, S. (2017). IT-enhanced popular reports: Analyzing citizen preferences. *Government Information Quarterly*, 34(2), 283-295.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public administration review*, 77(1), 32-44.
- Ferro, E., Loukis, E. N., Charalabidis, Y., & Osella, M. (2013). Policy making 2.0: From theory to practice. *Government Information Quarterly*, 30(4), 359-368.
- Gilardi, F. (2016). *Four ways we can improve policy diffusion research*. *State Politics & Policy Quarterly*, 16(1), 8-21. doi:10.1177/1532440015608761
- Halachmi, A., & Greiling, D. (2013). Transparency, e-government, and accountability: Some issues and considerations. *Public Performance & Management Review*, 36(4), 562-584.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominformasi

- kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140.
- Janssen, M., & Helbig, N. (2018). Innovating and changing the policy-cycle: Policy-makers be prepared!. *Government Information Quarterly*, 35(4), S99-S105.
- Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(5).
- Kim, S., & Lee, J. (2017). Citizen participation and transparency in local government: do participation channels and policy making phases matter?.
- Langella, C., Anessi-Pessina, E., Botica Redmayne, N., & Sicilia, M. (2023). Financial reporting transparency, citizens' understanding, and public participation: A survey experiment study. *Public administration*, 101(2), 584-603.
- Lourenço, R. P. (2023). Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101762.
- Manes-Rossi, F. (2019). New development: alternative reporting formats: a panacea for accountability dilemmas?. *Public Money & Management*, 39(7), 528-531.
- Manes-Rossi, F., Aversano, N., & Tartaglia Polcini, P. (2019). Popular reporting: learning from the US experience. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(1), 92-113.
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: connecting vision and voice. *International review of administrative sciences*, 78(1), 10-29.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45-57.
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1-17.
- Piotrowski, S. J., & Borry, E. (2010). An analytic framework for open meetings and transparency. *Public Administration and Management*, 15(1), 138.
- Porumbescu, G., Bellé, N., Cucciniello, M., & Nasi, G. (2017). Translating policy transparency into policy understanding and policy support: Evidence from a survey experiment. *Public Administration*, 95(4), 990-1008.
- Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika konsep *Dynamic Governance*. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(02).
- Sa'adah, N., & Sopiah, S. (2022). Fleksibilitas Kerja (Work Flexibility): Systematic Literatur Review With Bibliometric. *Jurnal Fusion*, 2(11), 833-844.